



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASARUDIN**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **184865**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	478.000.000
1. Tanah Seluas 1.662 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah Seluas 10.309 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000		
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
5. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000		
6. Tanah Seluas 4 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.192.458
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	588.192.458



III. HUTANG

Rp. 1.106.929.811

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. -518.737.353

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.